

artikel evi.doc

por 1 1

Fecha de entrega: 24-dic-2024 12:51p.m. (UTC+0800)

Identificador de la entrega: 2556478476

Nombre del archivo: artikel_evi.doc (113K)

Total de palabras: 5304

Total de caracteres: 35040

1 **Program Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Ekonomi Pembangunan**
(Studi Tentang Minat Usaha Kecil Dalam Mengurus Perijinan di Kantor Pelayanan Terpadu
(KPT) Kabupaten Bengkulu Utara)

Henny Aprianty⁶Evi Azwardi, Rahiman Dani
Magister Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap beberapa aspek terkait usaha⁵ kecil di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu: 1) Menyelidiki alasan mengapa pendaftaran usaha kecil Di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bengkulu Utara, kinerja yang dicapai masih belum optimal. Penelitian ini memiliki tiga tujuan u²ma: 1) untuk menganalisis tingkat efisiensi KPT, 2) untuk mengkaji tanggapan para pengusaha kecil terhadap keberadaan Pelayanan Perizinan Terpadu (one stop service) yang saat ini diterapkan di kabupaten tersebut, dan 3) untuk³ mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dalam proses pengurusan izin usahanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai⁸ keadaan atau fenomena yang teramati selama penelitian, dengan data yang diambil dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data, digunakan teknik yang meliputi Pengurangan Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat alasan utama yang menyebabkan rendahnya minat pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan usaha mereka ke KPT Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu: a) Biaya yang terkait dengan pengurusan izin, b) Pandangan pelaku bisnis mengenai proses perizinan, c) Beragam tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh usaha kecil yang membuat mereka kurang tertarik untuk mendaftar, dan d) Tingkat penyebaran informasi tentang KPT yang diterima oleh usaha kecil. Selain itu, mengenai keberadaan KPT, terdapat tiga faktor yang berpengaruh: a) Ketidapahaman para pelaku usaha mengenai keberadaan dan peran KPT bagi usaha kecil, yang disebabkan oleh sosialisasi KPT Bengkulu Utara yang kurang efektif di seluruh wilayah kabupaten, b) Usaha kecil tidak dianggap prioritas oleh KPT, dan c) Kurangnya koordinasi antara KPT dan instansi terkait. Di samping itu, terdapat tiga masalah utama yang dihadapi oleh usaha kecil, yakni modal, sumber daya manusia (SDM), dan pengurusan perizinan.

Kata kunci: Pelayanan Publik, Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).

16

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of analyzing: 1) To analyze why small businesses have not optimally registered their businesses with the Integrated Service Office (KPT) of North Bengkulu Regency, 2) To analyze how small business entrepreneurs respond to the existence of the Integrated Licensing Service (one stop service) in North Bengkulu Regency which is currently running, 3) To analyze¹² what the real problems of small businesses in North Bengkulu Regency are in managing busines⁷ permits. The type of research used in this thesis is descriptive with a qualitative approach. This study uses descriptive research, which is a study intended to collect information about the sta⁴ or symptoms that exist, namely symptoms according to what they are at the time the research was conducted, the data in this study were obtained from primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation methods, interview methods, and documentation methods. The data analysis techniques are using Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing/Verification. The results of this study indicate that: The interest of small business actors in registering their businesses with the North Bengkulu Regency KPT is caused by 4 reasons, namely: a) Cost of processing permits, b) Perception of business actors towards permits, c) Problems faced by small businesses on a daily basis that reduce interest in registering their businesses, d) Socialization of KPT received by small businesses; (2) The existence of the Integrated Service Office (KPT) has 3 factors: a) that the business community does not know the existence and function of the KPT for small businesses because the North Bengkulu KPT has not carried out optimal socialization throughout North Bengkulu Regency. b) small businesses are not a priority for KPT. c) Coordination between KPT and related agencies is not running; and (3) Main problems of small businesses, at least covering 3 things, namely capital, human resources, and permits.

Keywords: Business World, Public Services, Small Business, Licensing, Integrated Service Office (KPT).

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) di Kabupaten Bengkulu Utara telah berdiri sejak tahun 2006. KPT Kabupaten Bengkulu Utara melayani 8 jenis perijinan untuk mewujudkan deregulasi dan debirokratisasi pemerintah. Masyarakat tidak perlu mengunjungi berbagai dinas, cukup dengan singgah di satu kantor, semua urusan perizinan dapat diselesaikan di lokasi tersebut. Tujuan dari pelayanan perijinan terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan kepercayaan kepada pemerintah.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran krusial dalam ekonomi Indonesia. Berbagai daerah yang mengimplementasikan sistem pelayanan perizinan satu pintu berfokus pada pengembangan usaha kecil guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi besar dalam sektor usaha kecil, namun masih banyak kendala yang dihadapi UKM, seperti masalah perijinan. Penerapan pelayanan perijinan terpadu telah meningkatkan pengusaha yang mengurus perijinan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memiliki tujuan untuk memperbaiki pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik, seperti peraturan yang kaku, birokrasi yang berbelenggu, dan kurangnya inovasi dalam memberikan pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu terus memperbaiki pelayanan perijinan terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun telah memberlakukan sejumlah kemudahan dalam pelayanan perijinan, masih banyak pengusaha yang masih belum berminat untuk mengurus izin usahanya di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Penelitian mendalam diperlukan untuk mengungkap penyebab di balik ketidakminatan pengusaha untuk menggunakan layanan pelayanan perijinan terpadu di Kabupaten Bengkulu Utara.

Studi mengenai sektor usaha dan pelayanan publik ini berfokus pada belum maksimalnya ketertarikan usaha kecil dalam mengurus izin di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa pendaftaran usaha kecil di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bengkulu Utara belum mencapai tingkat optimal?
2. Bagaimana pandangan para pengusaha kecil mengenai keberadaan Pelayanan Perizinan Terpadu (one stop service) yang saat ini berjalan di Kabupaten Bengkulu Utara?
3. Apa sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil di Kabupaten Bengkulu Utara dalam pengurusan izin usaha mereka?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis alasan di balik minimnya partisipasi usaha kecil dalam mendaftarkan usaha mereka ke Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) di Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Menganalisis perspektif pengusaha usaha kecil terhadap keberadaan Pelayanan Perizinan Terpadu (one stop service) yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Untuk menganalisis apa sesungguhnya problem usaha kecil di Kabupaten Bengkulu Utara dalam pengurusan izin usaha.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk mengungkap solusi masalah berdasarkan data yang tersedia. Metode ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menganalisis, menginterpretasi, serta memungkinkan perbandingan dan penghubungan dengan data dan hasil penelitian lain yang relevan (Sugiyono, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi para pengusaha kecil dalam mengurus izin usaha di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bengkulu Utara. Observasi yang dilakukan mengungkapkan bahwa minat pengusaha kecil untuk mengurus izin usaha masih belum optimal. Menurut (Sugiyono, 2010) Penelitian ini juga berusaha menggali sebab dan alasan yang mempengaruhi minat tersebut, dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai masalah yang ada di KPT Kabupaten Bengkulu Utara..

Lokasi penelitian pada Kantor

Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bengkulu Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2024 s/d bulan Agustus 2024.

Untuk merangkum data dan informasi yang dibutuhkan, penulis menerapkan Metode Pengumpulan Data sebagai berikut:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Oleh karena itu, penelitian tesis ini melibatkan enam forman yang bertujuan untuk memahami minat usaha kecil dalam mengurus perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bengkulu Utara peneliti mewawancarai Masyarakat dan para pegawai Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bengkulu sebagai informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

HASIL

- a. Ketertarikan pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan usaha mereka di KPT Kabupaten Bengkulu Utara dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: a) biaya yang terkait dengan pengurusan izin, b) pandangan pelaku usaha terhadap perizinan, c) berbagai masalah yang dialami oleh usaha kecil sehari-hari yang menurunkan keinginan mereka untuk mendaftarkan usaha, dan d) sejauh mana sosialisasi mengenai KPT yang diterima oleh pelaku usaha kecil.
- b. Keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dipengaruhi oleh tiga faktor: a) kurangnya pengetahuan masyarakat pelaku usaha mengenai eksistensi dan fungsi KPT untuk usaha kecil, disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi KPT Bengkulu Utara di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, b) usaha kecil tidak mendapatkan perhatian prioritas dari KPT, dan c) koordinasi antara KPT dan instansi terkait tidak berjalan dengan baik.
- c. Tiga masalah utama yang dihadapi oleh usaha kecil mencakup modal, sumber daya manusia (SDM), dan pengurusan izin.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pada data hasil wawancara dengan para narasumber diatas, maka dalam Subbab ini akan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan didukung oleh teori-teori yang sesuai dengan pembahasan.

1. Minat Pelaku Usaha Kecil

Minat pengusaha kecil untuk mendaftarkan usaha mereka di KPT Kabupaten

Bengkulu Utara masih belum maksimal. Hasil studi lapangan menunjukkan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Biaya dan kerumitan proses pengurusan izin, 2) Pandangan pelaku usaha terhadap perizinan, 3) Berbagai Tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dalam kegiatan sehari-hari dapat mengurangi minat mereka untuk mendaftarkan usaha, serta 4) Penggunaan informasi mengenai KPT yang diterima oleh pengusaha kecil.

A. Biaya pengurusan perijinan

Pernyataan mengenai pelayanan KPT yang dijanjikan murah, mudah, dan cepat ternyata tidak sejalan dengan tanggapan dari masyarakat. Meskipun pelayanan mudah dan cepat, tidak semua pihak, terutama kalangan usaha kecil, dapat menerima pelayanan yang murah. Proses pengurusan ke KPT memerlukan syarat tambahan yang berbiaya, terutama rekomendasi dari pihak kecamatan atau kepala desa/kelurahan. Meskipun menurut KPT biaya pengurusan ijin terjangkau, para pelaku usaha kecil masih merasa terbebani dengan biaya tambahan tersebut. Kepala KPT menyatakan perlunya kemudahan dalam pengurusan ijin agar usaha kecil tidak terbebani. Dengan meningkatnya prospek usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan dari semua pihak sangat diperlukan.

B. Persepsi pelaku usaha terhadap perijinan

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah menerapkan biaya mengurus perijinan yang dianggap wajar bagi KPT, namun dianggap terlalu mahal oleh masyarakat terutama usaha kecil. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan kondisi yang dialami masyarakat. Pemberlakuan biaya perijinan seharusnya memperhatikan responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Meskipun demikian, Kabupaten Bengkulu Utara memberikan kemudahan dan insentif bagi usaha kecil baru, seperti pembebasan biaya pengurusan SIUP dan TDP. Namun, penenaan biaya dalam layanan perijinan seharusnya didasarkan pada pertimbangan keadilan dan tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah. Secara teoritis, tarif retribusi harus memperhitungkan efisiensi alokasi sumber daya, keadilan, dan kelestarian lingkungan.

Pemberlakuan biaya perijinan yang tinggi di Kabupaten Bengkulu Utara dapat menyebabkan dampak negatif, terutama jika tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan daerah tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan ulang kebijakan retribusi

perijinan agar sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik dan berkelanjutan.

C. Masalah-masalah yang dihadapi usaha kecil sehari-hari sehingga mengurangi minat untuk mendaftarkan usahanya

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa bagi Pengusaha yang telah mengurus izin di KPT tidak dijamin untuk memperoleh pinjaman modal dari bank. Ini juga merupakan pengalaman Bapak Sihanok menunjukkan bahwa meskipun izin usaha telah dimiliki, bank memiliki aturan yang seringkali tidak diikuti oleh pelaku usaha kecil.

Ketidakpastian dalam kemudahan mendapatkan modal meskipun sudah memiliki surat izin dari KPT telah dipahami oleh pelaku usaha. Banyak di antara mereka yang berusaha secara mandiri untuk mengajukan permohonan bantuan modal kepada bank.. Usaha kecil dapat membentuk kelompok kecil untuk mendapatkan bantuan dari bank meskipun tanpa izin KPT.

Mereka juga dapat memperoleh tambahan modal dari PUKK dan pemerintah tanpa izin KPT. Lembaga keuangan non-perbankan banyak membantu usaha kecil, termasuk NGO. Di Kabupaten Bengkulu Utara, izin di KPT gratis untuk usaha kecil, dan pemerintah memberikan pelatihan sebelum usaha dimulai.

D. Sosialisasi tentang KPT yang diterima usaha kecil

Sosialisasi yang tidak efektif membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi dengan baik, sehingga pandangan mereka terhadap pelayanan perijinan tidak berubah. Beberapa Anggota komunitas masih memanfaatkan jasa calo untuk mengurus perizinan di KPT Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini menyebabkan biaya pengurusan izin menjadi tinggi, dan seringkali biaya yang dipublikasikan bukanlah biaya resmi.

Kurangnya sosialisasi mengenai KPT berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat bahwa pengurusan izin kini lebih mudah, dan banyak yang masih percaya bahwa calo lebih memudahkan. Di beberapa wilayah, masyarakat tetap memiliki pandangan yang sama tentang pelayanan perijinan, bukan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, melainkan oleh prosedur perizinan yang masih kompleks dan membutuhkan waktu yang lama.

Meskipun konsep KPT bagus, kenyataan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perijinan belum meningkat. Proses pengelolaan akta kelahiran, contohnya, tidak mengalami

perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan KTP. Di samping itu, terdapat mengatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempublikasikan informasi tentang pelayanan publik. Pandangan masyarakat yang belum berubah dampaknya berasal dari kurangnya sosialisasi dan mekanisme pelayanan yang dirasa menyulitkan. Masyarakat butuh inovasi pelayanan yang nyata dan dapat dirasakan manfaatnya, sehingga sosialisasi KPT perlu ditingkatkan.

1. Keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)

Respon masyarakat terhadap eksistensi KPT Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penelitian ini mencerminkan tiga poin utama. Pertama, sosialisasi yang dilakukan KPT masih kurang efektif dan belum menjangkau sasaran utamanya, yaitu para pelaku usaha kecil di Bengkulu Utara, yang mengakibatkan banyak di antara mereka yang belum familiar dengan eksistensi KPT. Kedua, KPT belum memberikan perhatian yang memadai kepada usaha kecil, sehingga kebijakan yang dihasilkan Belum sepenuhnya menarik bagi mereka. Selain itu, kerjasama antara KPT dan instansi terkait juga tidak berjalan dengan lancar, yang mengakibatkan kebijakan yang diterapkan berbeda-beda antarinstansi, sehingga menyulitkan para pelaku usaha kecil.

A. Sosialisasi Belum Menyentuh Sasaran

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku usaha kecil, terungkap bahwa informasi terkait keberadaan KPT masih perlu disosialisasikan lebih lanjut masih belum memadai. Banyak pelaku usaha yang masih belum mengetahui KPT beserta fungsinya. Ibu Midah, seorang pedagang eceran, menjelaskan bahwa dia belum menerima informasi apa pun mengenai KPT, meskipun lokasinya tidak jauh, hanya sekitar 1 kilometer dari kantor KPT.

Sementara itu, Kepala KPT Indra Bengkulu Utara menyatakan bahwa mereka melakukan sosialisasi secara aktif, melibatkan aparat kecamatan dan desa, serta pihak perbankan, dengan memberikan izin gratis untuk menarik minat pelaku usaha. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala dan atraktif, termasuk acara gebyar dan pertemuan tatap muka. Namun, masih ada ketergantungan pada aparat pemerintah untuk menyebarluaskan informasi. Harapan KPT adalah Apabila pemerintah desa dan kecamatan mampu melanjutkan kegiatan

sosialisasi, tetapi di lapangan hal ini belum terjadi.

Keluhan Ibu Midah menunjukkan bahwa birokrasi di tingkat bawah, seperti Lurah dan Kepala Desa, belum memadai dalam memberikan pelayanan. Mentalitas mereka cenderung sebagai penguasa yang meminta dilayani, bukan memberikan pelayanan. Padahal, sosialisasi yang baik akan mendukung kebijakan pemerintah. Berdasarkan survei, meski ada perbaikan dalam pelayanan publik setelah otonomi daerah, masih banyak kelemahan dalam responsivitas dan informasi kepada masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa masih ada ketidakpuasan dalam pelayanan publik, disebabkan kurang responsif dan informatif. Banyak keluhan tidak ditanggapi, dan informasi tidak sampai. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap dan cara berpikir para pejabat pemerintah dalam memberikan layanan masih belum mengalami perubahan. Mereka masih cenderung terpengaruh oleh peraturan dan instruksi dari atasan, bukan oleh kepuasan masyarakat. Selain itu, budaya birokrasi yang lebih mengutamakan hubungan kemanusiaan di atas kinerja masih melekat. Oleh karena itu, perubahan perilaku aparat birokrasi belum sejalan dengan reformasi yang terjadi.

B. Usaha Kecil Belum Menjadi perhatian KPT

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan KPT terkait perizinan Satu pintu atau layanan serba ada pada dasarnya tidak memberi prioritas kepada usaha kecil. Hingga saat ini, usaha kecil di Bengkulu Utara masih belum menerima insentif yang memadai sejak penerapan KPT. KPT memandang semua jenis perusahaan-baik kecil, menengah, maupun besar-secara setara, tanpa membedakan satu sama lain. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) percaya bahwa ketiga kategori usaha tersebut perlu mengurus izin untuk mendukung pengembangan di masa mendatang. Sekarang ini, Usaha yang melakukan pendaftaran akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang setelah masa berlaku izin berakhir.

Kebijakan KPT yang lebih fokus pada dorongan bagi usaha kecil untuk mendapatkan izin, tanpa memperhatikan konteks serta karakteristik setiap usaha, tidak sejalan dengan pendekatan yang diterapkan oleh PERINDAGKOP dalam pengembangan usaha kecil. Berdasarkan pandangan

PERINDAGKOP, semua pihak yang memiliki komitmen untuk memajukan usaha kecil seharusnya melakukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi usaha kecil, agar dapat memahami berbagai tantangan yang dihadapi. Kebijakan KPT yang diambil tanpa memperhatikan kepentingan usaha kecil dinilai oleh PERINDAGKOP lebih mengutamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan penguatan sektor informal.

C. Koordinasi KPT dengan Instansi Terkait Tidak Berjalan

Paradigma instansi pemerintah daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan evaluasi terhadap usaha kecil menunjukkan adanya variasi. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat perbedaan pandangan antara Dinas Perindustrian dan Koperasi (Perindagkop) dengan Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). DISNAKER menilai usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja; jika lebih dari 12 orang, usaha wajib mengurus izin tenaga kerja, tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. DISNAKER tidak memperhatikan kriteria usaha kecil atau usaha baru, fokus utamanya adalah pada pemenuhan jumlah tenaga kerja sesuai undang-undang.

Sejumlah usaha kecil berkumpul, sehingga total tenaga kerja yang tercatat menjadi lebih tinggi. Mengurus izin tenaga kerja menjadi beban bagi usaha kecil, terutama terkait administrasi dan biaya yang diperlukan. KPT mengakui perlunya koordinasi lebih baik dalam penanganan usaha kecil, dengan Perindagkop sebagai sektor utama dalam pengembangan usaha kecil.

Perbedaan cara pandang antara DISNAKER, KPT, dan Perindagkop menghambat pengembangan usaha kecil dan mempengaruhi kinerja KPT sebagai pelayanan publik. Ketidaksesuaian pandangan ini mengakibatkan kurangnya respon positif dari kalangan usaha kecil terhadap KPT. Selain itu, sosialisasi KPT bertentangan dengan imbauan dari SKPD lain agar pelaku usaha tidak mengurus izin jika belum siap. Hal ini menunjukkan kurangnya persiapan matang dalam pembentukan KPT.

DISNAKER yang mengabaikan kondisi usaha kecil dapat berbahaya bagi perekonomian daerah, menciptakan kebingungan bagi usaha kecil dan menghambat pelayanan publik. Pelayanan

publik seharusnya diutamakan dengan semangat pengabdian, mempermudah, dan bersifat terbuka. KPT perlu membangun koordinasi antar instansi dan reformasi birokrasi agar bisa lebih dinamis, inovatif, dan profesional dalam memberikan pelayanan. Reformasi dalam sistem birokrasi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Pembaruan harus melibatkan perubahan budaya birokrasi dari kekuasaan ke pelayanan..

1. Masalah Utama Usaha Kecil

Dalam penelitian ini, terdapat empat aspek utama yang menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu: 1) pendanaan, 2) tenaga kerja, 3) izin usaha.

A. Modal

Menurut (Puspitaningtyas, 2017) Bagi para pelaku usaha kecil, tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan permodalan. Dalam sebuah wawancara dengan para pedagang eceran, mereka menyatakan bahwa kebutuhan akan modal sangat mendesak. Ibu Midah contohnya, merasa usahanya memerlukan modal untuk berkembang, meskipun kadang meminjam dari grosir dengan ketentuan tertentu. Bagi Ibu Midah, modal merupakan aspek krusial untuk dapat bertahan dalam usaha. Observasi menunjukkan bahwa usaha kecil dijalankan dengan cara yang sederhana, mayoritas merupakan usaha keluarga yang hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan usaha sebagian besar masih tradisional tanpa pembukuan yang jelas.

Ibu Midah membuka usaha pukul 7 pagi hingga 10 malam, dengan jam tutup yang bervariasi sesuai kepadatan pembeli, khususnya saat malam minggu. Meskipun modal sangat diperlukan, banyak pelaku usaha kecil merasa enggan untuk meminjam. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pinjaman merupakan utang yang harus dilunasi, sementara pendapatan yang dihasilkan dari usaha belum tentu memadai untuk membayar utang tersebut.

Dari wawancara di Kabupaten Bengkulu Utara, diketahui bahwa perbankan memiliki peran kecil dalam pengembangan usaha mikro. Terdapat berbagai ketentuan dan regulasi yang menghambat akses usaha kecil terhadap modal bank, termasuk keluhan mengenai kebijakan bunga tetap. Kepercayaan bank terhadap usaha kecil juga rendah,

terbukti dari angka pengembalian kredit yang rendah. Dari 26 usaha kecil yang mendapatkan kredit di Bank Bengkulu, hanya satu yang berhasil mengembalikan pinjamannya.

Syarat bank yang meminta agunan bagi Pinjaman tertentu sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil, karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki aset yang bisa dijadikan jaminan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, pada umumnya usaha kecil tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan, bahkan beberapa pelaku usaha tinggal di rumah sewa.

Kebutuhan modal bagi usaha kecil adalah fakta yang tidak bisa dihindari untuk pengembangan usaha. Keberadaan KPT tidak cukup tanpa dukungan dari lembaga perbankan untuk membantu pembiayaan. KPT yang tidak melibatkan bank secara efektif sering kali gagal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi usaha kecil. Akses ke perbankan bagi usaha kecil menjadi sangat sulit, seringkali terhambat oleh persyaratan yang memberatkan.

Menurut (Abdullah, 2005) menjelaskan bahwa perbankan enggan melayani usaha mikro dan kecil karena pembiayaan mereka dianggap merepotkan mengingat banyaknya nasabah dan kecilnya pinjaman. Permintaan untuk komisi di balik pinjaman dan prosedur yang rumit juga menjadi masalah. Proses pengajuan pinjaman yang perlu melalui banyak tahapan, dari proposal hingga survei, dianggap mempersulit perbankan dalam melayani usaha kecil.

Meskipun bank menyatakan mendukung UMKM dan siap memberikan kredit, kenyataannya syarat yang ketat dan kewajiban tertentu seringkali tidak mendukung perkembangan usaha kecil. Data dari Bank Indonesia menunjukkan UMKM memiliki prospek baik dengan penjualan harian yang cukup tinggi. Namun, pada kenyataannya, syarat pinjaman lebih berfokus pada jaminan yang dimiliki pengusaha ketimbang kelayakan usaha itu sendiri.

Menurut (Karunia, 2016) menyatakan Fungsi utama dari perbankan adalah bertindak sebagai institusi yang menjadi perantara keuangan dan agen pembangunan. Terutama di negara berkembang, perbankan diharapkan bisa memberikan layanan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Ironisnya, perbankan nasional seperti BRI yang bertujuan

membantu rakyat, masih belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada pelaku usaha kecil. Birokrasi yang ada belum dapat menyelesaikan masalah pelayanan publik sesuai kebutuhan rakyat, terutama dalam konteks perbankan yang lebih melayani pengusaha besar.

B. SDM

Permasalahan inti yang dihadapi oleh usaha kecil di Kabupaten Bengkulu Utara sebenar²³ tidak terletak pada ketiadaan izin usaha. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil di daerah tersebut telah ada dan berkembang sejak lama tanpa izin. Lebih jauh lagi, isu yang dihadapi oleh usaha kecil di Bengkulu Utara ternyata sangat rumit. Selain perizinan, tantangan terkait Modal, pemasaran, dan bahan baku merupakan aspek penting, namun masalah Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi isu yang sangat penting dan perlu segera mendapatkan perhatian.

Dalam hasil wawancara dengan para pelaku usaha kecil, diungkapkan bahwa permasalahan utama bagi mere¹⁹ bukanlah pada aspek perizinan, melainkan pada kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini mencakup kemampuan dalam mengelola usaha, pola perilaku pemilik usaha, mentalitas bisnis, serta pengalaman sebagai wirausahawan. Banyak usaha kecil yang memiliki SDM yang masih rendah, yang sering kali menjadi penghalang bagi perkembangan usaha (Utami & Sujarweni, 2020). Oleh karena itu, masalah yang dihadapi oleh usaha kecil bukan hanya terbatas pada perizinan, tetapi juga mencakup aspek modal dan, yang tak kalah penting, kualitas SDM.

Seringkali, tindakan pelaku usaha tidak selaras dengan kebutuhan bisnis yang mereka jalani. Sebagian besar dari mereka yang mendapatkan pinjaman, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan, cenderung memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan konsumtif ketimbang untuk meningkatkan modal usaha. Akibatnya, pinjaman modal usaha kecil malah sering kali membuat mereka terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Bagi pemerintah, mereka merespons kebutuhan modal usaha kecil, tetapi hal ini sering mengakibatkan situasi 'gagal bayar' di kalangan pelaku usaha kecil.

Lebih lanjut, pelaku usaha kecil di Kabupaten Bengkulu Utara mengemukakan bahwa di lapangan, pemerintah masih lebih fokus pada peningkatan kuantitas usaha kecil

tanpa menyentuh aspek-aspek substansial. Misalnya, perilaku dan cara berpikir para pelaku usaha. Seringkali, bantuan finansial berupa pinjaman yang diberikan oleh pemerintah menjadi kurang berarti saat diterima oleh para pengusaha kecil.

Pemerintah sering kali salah dalam memahami masalah utama yang dihadapi oleh usaha kecil, sehingga kebijakan yang diambil sering kali tidak tepat sasaran dan bahkan menjadi penghalang. Mengenai sikap usaha kecil yang cenderung 'boros', Nugroho dan Dahuri (2004:168) mengungkapkan mengenai fenomena budaya kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat. Budaya kemiskinan tersebut ini dapat memperparah kondisi masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan, terlihat dari ciri-ciri seperti rendahnya keterampilan kerja, tingkat tabungan yang minim, dan perilaku konsumtif. Upaya²¹ mengatasi kemiskinan kultural ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh para pengambil kebijakan jika hanya menggunakan pendekatan struktural seperti KPT. Pendekatan yang lebih tepat adalah dengan perspektif sosiologis, yang juga bertujuan untuk mewujudkan hak asasi setiap individu.

C. Perijinan

Satu aspek yang menjadi hambatan bagi usaha kecil adalah pola pikir yang 'traumatis' terkait pengurusan izin dari pemerintah, sehingga seringkali para pelaku usaha enggan untuk mengajukan permohonan izin Kepala KPT menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa pemahaman masyarakat mengenai proses perizinan masih didasarkan pada anggapan lama. Masyarakat masih percaya bahwa mengurus Proses perizinan saat ini masih rumit dan kompleks, sehingga menjadi beban ketika mereka akhirnya harus menanganinya.

Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh usaha kecil tidak hanya terjadi di Bengkulu Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2005:100) menunjukkan bahwa masalah usaha kecil bersifat sangat kompleks. Dalam studi tersebut yang dilaksanakan di Bengkulu, khususnya di Kota Medan, ditemukan dua kategori masalah yang dapat diidentifikasi pada usaha kecil, yaitu masalah eksternal dan internal. Masalah eksternal mencakup hal-hal seperti halnya dengan premanisme, pungutan liar, serta perizinan dan retribusi yang tidak mendukung, semua ini sering kali menjadi penghalang bagi

pertumbuhan usaha kecil. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan internal yang berkaitan dengan modal, manajemen usaha, dan akses ke pasar.

22
Isu mengenai usaha kecil ini sejalan sesuai dengan uraian yang disampaikan oleh (Redi et al., 2022) yang telah dikaji dalam konteks teori. Mereka mengidentifikasi bahwa kekurangan yang umum dihadapi oleh usaha kecil meliputi keterbatasan modal, kekurangan tenaga kerja terampil (Sumber Daya Manusia), dan minimnya program untuk pengembangan keterampilan.

Oleh karena itu, berdasarkan karakteristik permasalahan yang ada pada usaha kecil, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris, Kabupaten Bengkulu Utara cenderung mengalami kesamaan. Seharusnya, pemerintah daerah telah melakukan penelitian awal mengenai keadaan Usaha kecil di Bengkulu Utara perlu mendapatkan perhatian, baik dari segi pendekatan ekonomi pembangunan maupun sosiologis, agar pemerintah kabupaten dapat memberikan dukungan yang tepat. memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik masalah usaha kecil di wilayah tersebut.

Hingga kini, banyak pemerintah di berbagai negara masih mengalami tantangan dalam mengenali sektor informal, termasuk usaha kecil. Menurut Elwert, Evers, dan Wilkens dalam Evers dan Korff (2002:235), masalah ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga berfungsi sebagai alat analisis yang seharusnya dijelaskan dalam konteks teoritis. Namun, aspek ini juga perlu dianalisis dari sudut pandang sosiologis. Sifat khas dari usaha kecil terletak pada skala ekonomi yang sangat kritis, di mana usaha terakhir yang dilakukan adalah berjuang untuk tetap bertahan dan mempertahankan sistem reproduksinya dengan memanfaatkan celah-celah ekonomi yang tersedia.

Kelemahan yang sering terjadi pada Pemerintah Daerah adalah kurangnya pemahaman terhadap karakteristik isu-isu di masyarakat sebelum mengambil keputusan penting. Kebijakan dalam penyusunan KPT sering kali hanya didasarkan pada Perintah konstitusi dijalankan tanpa adanya penyelidikan pendahuluan yang lebih rinci. Pandangan ini didukung oleh Arifin dan (Didik J. Rachbini, 2001), yang menegaskan bahwa kebijakan pemerintah seringkali

menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat, disebabkan oleh kurangnya penelitian akademis yang mendalam sebelum dan setelah pengembangan UKM.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara seharusnya melakukan kajian mendalam mengenai kondisi usaha kecil di daerah tersebut. Dengan pemahaman yang tepat, kebijakan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bengkulu Utara. Meskipun niat pemerintah untuk mendukung usaha kecil sangat besar, jika tidak didukung oleh perencanaan yang baik dan data yang akurat, pelaksanaan di lapangan akan menghadapi berbagai hambatan. Secara teoritis, penerapan prinsip desentralisasi dengan memberikan otonomi daerah seharusnya membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Menurut Rondinelli, yang dikutip oleh (Rismawati et al., 2023), terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah :

1. Dengan penerapan otonomi, struktur penyampaian layanan menjadi lebih optimal karena insansi penyedia layanan publik beroperasi lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan dengan lebih efisien.
2. Layanan yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
3. Pemeliharaan infrastruktur yang ada ditingkatkan melalui alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Tugas-tugas rutin dialihkan dari pusat ke daerah, sehingga pusat dapat lebih memfokuskan perhatian pada kebijakan.
5. Terdapat peningkatan daya saing dalam penyediaan layanan antara unit pemerintah serta antara sektor publik dan swasta di bawah arahan pemerintah daerah.
6. Hal ini membuat birokrasi lebih fokus pada kepentingan masyarakat.

Menurut Rondinelli, pemerintah daerah seharusnya dalam melaksanakan layanan perizinan terpadu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara, dapat menyesuaikan layanan tersebut dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat. Selain itu, dengan semakin dekatnya akses layanan secara geografis, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi dalam birokrasi agar dapat lebih memperhatikan kepentingan masyarakat.

Menurut (Hutagalung, 2021) , peningkatan mutu pelayanan publik di daerah

seharusnya dapat dicapai melalui pembentukan komitmen moral yang kuat dari seluruh jajaran pemerintah daerah, serta dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Komitmen yang kokoh dari pemimpin, khususnya kepala daerah, yang didukung oleh staf atau tim internal yang berperan sebagai pemikir dan mitra dialog, akan secara signifikan memperkuat usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Tim internal pemerintah daerah berfungsi sebagai agen perubahan dalam sistem birokrasi. Anggota tim ini umumnya terdiri dari kepala dinas atau pejabat yang memiliki visi, misi, dan strategi yang sejalan dengan tujuan kepala daerah. Di samping itu, partisipasi pemangku kepentingan eksternal juga sangat penting untuk memberikan masukan, evaluasi, serta saran konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Akan tetapi, kondisi di KPT Bengkulu Utara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak berjalan seiring dengan pembentukan pelayanan perizinan terpadu (KPT). Terjadi kurangnya koordinasi antara SKPD, adanya perbedaan perspektif, serta kebijakan yang saling bertentangan bertentangan menunjukkan bahwa birokrasi belum mengalami perubahan, meskipun proses perizinan telah bergeser dari terdistribusi menjadi terpusat. Kebijakan yang tidak diterapkan secara menyeluruh dalam reformasi pelayanan publik pada kenyataannya menghadapi kendala dalam implementasinya, sebagaimana yang terlihat di Kabupaten Bengkulu Utara.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data lapangan dan pengamatan yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil menarik tiga kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Pertama, terdapat kesimpulan mengenai rendahnya minat usaha kecil untuk mendaftarkan diri ke KPT Bengkulu Utara. Kedua, kesimpulan mengenai pandangan masyarakat terhadap keberadaan KPT Bengkulu Utara. Ketiga, kesimpulan mengenai permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha kecil di Kabupaten Bengkulu Utara. Rincian lebih lanjut akan disajikan di bawah ini.

Keimpulan

- a. Ketertarikan pelaku usaha kecil untuk

mendaftarkan usaha mereka di KPT Kabupaten Bengkulu Utara dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: a) biaya yang terkait dengan pengurusan izin, b) pandangan pelaku usaha terhadap perizinan, c) berbagai masalah yang dialami oleh usaha kecil sehari-hari yang menurunkan keinginan mereka untuk mendaftarkan usaha dan d) sejauh mana sosialisasi mengenai KPT yang diterima oleh pelaku usaha kecil.

- b. Keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dipengaruhi oleh tiga faktor: a) kurangnya pengetahuan masyarakat pelaku usaha mengenai eksistensi dan fungsi KPT untuk usaha kecil, disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi KPT Bengkulu Utara di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, b) usaha kecil tidak mendapatkan perhatian prioritas dari KPT, dan c) koordinasi antara KPT dan instansi terkait tidak berjalan dengan baik.
- c. Tiga masalah utama yang dihadapi oleh usaha kecil mencakup modal, sumber daya manusia (SDM), dan pengurusan izin.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebaiknya mulai mengevaluasi penerapan tarif atau biaya untuk layanan perizinan usaha kecil ke depan, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat agar tidak menjadi beban. Diharapkan dapat diambil kebijakan untuk membebaskan biaya perizinan bagi usaha kecil yang mendaftar.
3. Untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif, pelayanan perizinan terpadu (KPT) seharusnya diimbangi dengan inovasi dan langkah-langkah lain di luar perizinan yang berkaitan dengan penciptaan iklim usaha yang baik. Ini termasuk peningkatan Sumber Daya Manusia, penyediaan akses modal, pengembangan kawasan industri, serta penyediaan bahan baku yang saat ini menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha di Bengkulu Utara..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F. (2005). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. UMM Press.
- Didik J. Rachbini. (2001). *Ekonomi politik dan kebijakan publik*. Grasindo.
- Hutagalung, G. S. (2021). Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp).

- Jurnal JURISTIC*, 2(01), 99.
<https://doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2141>
- Karunia. (2016). *Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. 4(June), 2016.
- 29 Puspitaningtyas, Z. (2017). *Pembudayaan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah*. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 361.
- 24 <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.242>
- Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282.
<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>
- 27 Rismawati, S., Pradiani, T. P., & Fathorrahman. (2023). Analisis Pengaruh Training, Pengembangan SDM Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di PT. Optimech Engineering Batam. *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 154–171. <https://doi.org/10.59086/jeb.v2i1.242>
- 11 Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. In
- 26 *Bandung: Alfabeta*. (p. 118). Alfabeta
- Utami, L. R., & Sujarweni, V. W. (2020). PERAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta). *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 9(1), 86–96.
<https://doi.org/10.30591/monex.v9i1.1719>

artikel evi.doc

INFORME DE ORIGINALIDAD

12%

INDICE DE SIMILITUD

12%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

2%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1 lib.ui.ac.id Fuente de Internet 2%

2 makalah18.blogspot.com Fuente de Internet 2%

3 www.slideshare.net Fuente de Internet 1%

4 ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id Fuente de Internet 1%

5 www.mitrariset.com Fuente de Internet 1%

6 journals.unihaz.ac.id Fuente de Internet 1%

7 Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Trabajo del estudiante <1%

8 Farichatun Nisa'. "MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR DI <1%

KABUPATEN JOMBANG", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014

Publicación

9	repo.undiksha.ac.id Fuente de Internet	<1 %
10	www.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
11	manajemen.fe.um.ac.id Fuente de Internet	<1 %
12	digilib.uinsa.ac.id Fuente de Internet	<1 %
13	repository.umsu.ac.id Fuente de Internet	<1 %
14	id.123dok.com Fuente de Internet	<1 %
15	id.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
16	perbanas.id Fuente de Internet	<1 %
17	eprints.walisongo.ac.id Fuente de Internet	<1 %
18	idoc.pub Fuente de Internet	<1 %
19	journal.unj.ac.id Fuente de Internet	<1 %

20	docobook.com Fuente de Internet	<1 %
21	eprints.uny.ac.id Fuente de Internet	<1 %
22	penerbitgoodwood.com Fuente de Internet	<1 %
23	pt.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
24	repository.iti.ac.id Fuente de Internet	<1 %
25	stp-mataram.e-journal.id Fuente de Internet	<1 %
26	eprints.uad.ac.id Fuente de Internet	<1 %
27	jurnal.kdi.or.id Fuente de Internet	<1 %
28	pasca-umi.ac.id Fuente de Internet	<1 %
29	repository.unisma.ac.id Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias Apagado

Excluir bibliografía

Activo

